

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS
INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH****Muflihah**Muflihahjufri1@gmail.com**Universitas Islam Madura****Evi Malia**malliephie@gmail.com**Aminatuz zakhra****ABSTRACT**

The purpose of this study is to find out and test whether Human Resources, Information Technology, Internal Control Systems, Information Value, Financial Supervision affect the Quality of Financial Statements. This type of research is using quantitative methods using multiple linear regression tests with the help of SPSS Version 20.0. The population in this study is all SKPD in Pamekasan Regency with the number of SKPD 45 conducted by selecting subjects using the Purposive sampling method. Determination of the number of samples, which are located in the accounting, accounting and financial fields, head of accounting and reporting, PPK, SKPD, BKD, PPKD, 20 Inspectorate offices, BUD obtained 30 respondents who will answer questions through a distributed questionnaire. From the results of the Adjusted RSquare deregulation obtained 10.9% then this quality of Financial Statements can be explained by Human Resources, Information Technology, Internal Control Systems, Information Values, Financial Supervision while the remaining 89.3% are influenced by other variables outside of this study. Based on the results of known data analysis through partial tests (T Test) that Human Resources significantly influence the Quality of Regional Financial Reports, Information Technology does not affect the Quality of Regional Financial Reports, Internal Control Systems significantly influence the Quality of Regional Financial Reports, Technology Information does not significantly influence the Quality of Financial Statements. While based on simultaneous testing (Test F) shows that Human Resources, Internal Control Systems, and Financial Supervision have a significant effect on the Quality of Financial Statements in Pamekasan Regency.

Keywords: Human Resources, Information Technology, Internal Control Systems, Value of Information, Financial Supervision and Quality of Financial Statements.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji apakah Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Nilai Informasi, Pengawasan Keuangan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jenis penelitian ini yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan uji regresi linier berganda dengan bantuan SPSS Versi 20,0. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh SKPD di Kabupaten Pamekasan dengan jumlah SKPD 45 yang dilakukan dengan memilih subjek dengan menggunakan Metode Purposive sampling. Penentuan jumlah sample yaitu yang berada dibagian, bidang akuntansi dan laporan keuangan, kepala bidang akuntansi dan pelaporan, PPK, SKPD, BKD, PPKD, 20 dinas Inspektorat, BUD yang diperoleh sebanyak 30 responden yang akan menjawab pertanyaan melalui kuesioner yang disebar. Dari hasil derterminasi Adjusted RSquare diperoleh 10,9% maka hal ini kualitas Laporan Keuangan dapat dijelaskan oleh Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Nilai Informasi, Pengawasan Keuangan sedangkan sisanya 89,3% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian analisis data yang diketahui melalui uji parsial (Uji T) bahwa Sumber Daya Manusia berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, Teknologi Informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Sedangkan berdasarkan uji simultan (Uji F) menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Nilai Informasi dan Pengawasan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Pamekasan

Kata kunci: Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Nilai Informasi, Pengawasan Keuangan dan Kualitas Laporan Keuangan.

PENDAHULUAN

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum juga mempunyai kemampuan prediktif dan prospektif dalam hal memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi berkelanjutan. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem informasi mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Ada beberapa faktor menurut beberapa penelitian diantaranya adalah Sumber Daya Manusia, Pengendalian intern, Teknologi Informasi, Peagawasan Keuangan, Nilai Informasi.

TINJAUAN TEORETIS

Penelitian terdahulu

Mansur, et.al (2017) meneliti tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”, menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik pengambilan data penelitian di peroleh melalui penyebaran kusioner (primer) yang di berikan kepada responden dengan jenis pernyataan dengan pernyataan tertutup. Populasi dari penelitian ini adalah analisis terhadap

nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah dengan sampel sebanyak 83 responden.

Mahaputra (2014) meneliti tentang "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah". Menggunakan metode analisis statistik deskriptif dengan teknik sampel menggunakan *proportional stratified random sampling*. Populasi penelitian ini berjumlah 32 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten Gianyar yang melaksanakan fungsi akuntansi atau penata usaha keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kapasitas Sumber Daya Manusia, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, sistem pengendalian intern dan implementasi standart akuntansi berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan di SKPD Kabupaten Gianyar.

Arfianti (2011) meneliti tentang "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah". Menggunakan metode analisis kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Data penelitian ini di peroleh dari konsioner yang di berikan kepada responden, yaitu kepala dan staf sub bagian akuntansi atau penata usahaan keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah bagian akuntansi atau penata usahaan keuangan pada Satua Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kabupaten Batang dengan jumlah 67 SKPD.

Teori Keagenan

Mardiasmo (2009:3) menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Masalah keagenan muncul ketika eksekutif cenderung memaksimalkan *self interest*-nya yang dimulai dari proses penganggaran, pembuatan keputusan, sampaidengan menyajikan laporan keuangan yang sewajar-wajarnya untuk memperlihatkan bahwa kinerja mereka selama ini telah baik, selain itu juga untuk mengamankan posisinya di mata legislatif dan rakyat. Teori keagenan juga menyatakan bahwa agen bersikap oportunistis dan cenderung tidak menyukai resiko. Tanggung jawab yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan. Pemerintah daerah sebagai agen akan menghindari resiko berupa ketidakpercayaan *stakeholders* terhadap kinerja mereka. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan berusaha untuk menunjukkan bahwa kinerja mereka selama ini baik dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah

Khasmir (2016:66) Laporan keuangan merupakan alat untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan pada tanggal tertentu (*balance sheet*) dan hasil usaha yang telah di capai perusahaan dalam suatu periode tertentu (*income statement*). Data keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak yang berkepentingan apabila data keuangan tersebut dibandingkan untuk dua periode atau lebih dan selanjutnya dianalisis untuk mendukung keputusan yang akan diambil. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kepercayaan yang diberikan oleh pemilik perusahaan untuk mengelola sumber-sumber perusahaan. Dengan melakukan analisis laporan keuangan perusahaannya, manajemen akan mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan dan hasil- hasil usaha perusahaan pada masa yang lalu. Hasil ini dapat diketahui kelemahan-kelemahan serta hasil-hasil apa yang di pandang cukup baik.

Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan pengendalian. Proses ini terdapat dalam fungsi atau bidang produksi, pemasaran, keuangan, maupun pegawai karena Sumber Daya Manusia (SDM) dianggap semakin penting perannya dalam pencapaian tujuan perusahaan, maka berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang SDM dikumpulkan secara sistematis dalam apa yang disebut manajemen Sumber Daya Manusia. Istilah “manajemen” mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya *manage* (mengelola) Sumber Daya Manusia. Rivai dan Sagala (2009:1).

Teknologi Informasi

Kadir (2003:12) mengemukakan bahwa Teknologi Informasi adalah segala perangkat yang digunakan untuk menangkap data atau informasi dari sumber asalnya. Supaya informasi dapat diterima oleh pemakai yang membutuhkan, informasi yang disajikan dalam berbagai bentuk mempercepat pengelolaan data dan transaksi penyajian laporan keuangan.

Dalam hal ini teknologi keluaran mempunyai andil yang cukup besar. Pada umumnya informasi di sajikan dalam monitor. Namun, kadang kala pemakai menginginkan informasi yang tercetak dalam kertas (*hard copy*). Pada keadaan seperti ini, terdapat berbagai peran dalam menentukan kualitas cetakan. Dewasa ini, terdapat berbagai peranti yang mendukung penyajian informasi, termasuk dalam suara.

Nilai Informasi

Kadir (2003:4) Nilai informasi adalah kemampuan yang banyak melibatkan pemakaian dan memerlukan sarana informasi yang memungkinkan pemakai yang tersebar diberbagai tempat yang berjauhan dapat berbagi informasi. Sistem informasi

memberikan nilai tambah terhadap proses produksi, kualitas, manajemen, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah serta keunggulan kompetitif yang tentu saja sangat berguna bagi kegiatan bisnis, oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika perusahaan-perusahaan bisnis masa kini melibatkan komponen perilaku dan teknologi yang berinteraksi di dalam lingkungan sosioteknologi.

Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern merupakan salah satu fondasi terkuat *good governance*. Sistem pengendalian intern suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur suatu sumber daya suatu organisasi yang meliputi yaitu hasil evaluasi pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan BPK, wajar dengan pengecualian WDP, Wajar Tanpa Pengecualian WTP dan tidak memberikan opini. untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi pemerintah, dan menjamin pengamanan aset negara. Adapun sistem akuntansi yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah yaitu pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. (Budiawan 2014:24)

Pengawasan Keuangan

Ulum (2009:137) menyatakan bahwa Pengawasan keuangan daerah untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang pasal 23 ayat (5) UUD 1945 hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat. Pengawasan dalam setiap kegiatan pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah termasuk didalamnya keputusan kepala daerah yang merupakan akibat mutlak dari adanya negara kesatuan. Dalam rangka pengawasan, pemerintah menciptakan aparat dilingkungan pemerintahan, yaitu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Hipotesis

H₁: Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan kualitas informasi keuangan.

H₂ Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan Keuangan

H₃ Pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan daerah.

H₄ Nilai informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah

H₅ Pengawasan Keuangan berpengaruh terhadap kualitas nilai laporan keuangan daerah

H₆ Penerapan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian, Intern, Nilai Informasi, pengawasan Keuangan berpengaruh terhadap kualitas nilai informasi Laporan Keuangan Daerah

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kuantitatif

Populasi dan data penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD di Kabupaten Pamekasan dengan jumlah SKPD 45. Peneliti menggunakan *Purposive Sampling* atau *Judgmental Sampling*, yaitu cara penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih 22 subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Cara memperolehnya dengan menyebarkan kuesioner kepada instansi pemerintah terkait dengan pengiriman secara langsung kepada pihak yang bersangkutan

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan Kuesioner /Angket. Prosedur pengumpulan data melalui kuesioner digunakan untuk memperoleh informasi mengenai Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal, Nilai Informasi, dan Pengawasan Keuangan sehingga dapat dianalisis pengaruhnya terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Definisi operasional variabel

Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia adalah kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi guna mencapai tujuannya. Pengelolaan keuangan daerah yang harus mempunyai Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

Berdasarkan penelitian (Notoatmodjo, 2003 dalam Mansur, 2017) Variable ini dapat diukur dengan 3 pertanyaan dengan indikator yaitu:

- a. Pendidikan di bagi menjadi: pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non formal.
- b. Pelatihan : yang diberikan tenaga ahli, pelatihan yang tepat, materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan pemakai
- c. Pengalaman, dibutuhkan untuk menentukan spesifikasi dan prestasi pekerjaan.

Teknologi informasi

Teknologi Informasi adalah kecepatan dalam pemrosesan informasi serta potensi pemanfaatannya secara luas yang dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan secara cepat dan akurat. Kadir (2003:12)

Variabel ini dapat diukur dengan 2 pertanyaan dengan indikator yaitu:

- a. Mempercepat pengelolaan data dan transaksi
- b. Penyajian laporan keuangan

Dengan menggunakan skor 4

Sistem Pengendalian Intern

Merupakan salah satu fondasi terkuat *good governance*. Sistem pengendalian intern suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur dan mengukur suatu sumber daya suatu organisasi. Budiawan (2014:24)

Variabel ini dapat diukur dengan 1 pertanyaan dengan indikator yaitu:

- a. Hasil evaluasi pemeriksaan Inspektorat dalam 5 tahun terakhir.

Dengan menggunakan skor point (1 = sangat sesuai (SS), 2 = Sesuai (S), 3 = Tidak Sesuai (TS), 4 = Sangat tidak sesuai (STS).

Nilai Informasi

Kemampuan yang banyak melibatkan banyak pemakai dan memerlukan sarana informasi yang memungkinkan pemakai yang tersebar diberbagai tempat yang berjauhan dapat berbagi informasi.

Kadir (2003:4) Variabel ini dapat diukur dengan 4 pertanyaan dengan indikator yaitu:

- a. Relevan, yang relevan memiliki unsur-unsur yaitu, manfaat umpan balik, manfaat prediktif, tepat waktu, lengkap.
- b. Andal, yang memenuhi karakteristik yaitu, penyajian jujur, dapat diverifikasi, netralitas
- c. Dapat dibandingkan
- d. Dapat dipahami

Pengawasan Keuangan

Pengawasan Keuangan adalah setiap kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang merupakan akibat mutlak dari adanya Negara kesatuan. Dalam rangka pengawasan, pemerintah menciptakan aparat di lingkungan pemerintah. (APIP) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Berdasarkan (Ulum, 2009:137) Variabel ini dapat diukur dengan 3 pertanyaan dengan indikator yaitu:

- a. Perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi.
- b. Untuk membandingkan kinerja aktual dengan standart yang telah ditentukan.
- c. Untuk menetapkan Suatu penyimpangan.

Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Merupakan alat untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan pada tanggal tertentu (*balance sheet*) dengan hasil usaha yang telah di capai perusahaan dalam suatu periode tertentu (*income statement*).

Khasmir (2016:66) Variabel ini dapat diukur dengan 3 pertanyaan dengan indikator yaitu:

- a. Hasil evaluasi Pemeriksaan BPK dalam 5 tahun terakhir

HASIL DAN PEMBAHASAN**Tabel 1 hasil uji T**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,956	,455		2,103	,000
SDM	-,094	,066	-,191	-1,419	,169
Teknologi informasi	,073	,069	,150	1,059	,910
SPI	,920	,059	,963	15,633	,046
Niai informasi	,058	,070	,065	,836	,411
Pengawasan keuangan	-,193	,078	-,167	-2,467	,021

a. Dependent Variable: laporankeuangan

Tabel 1 hasil uji**ANOVA^a**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	37,329	5	4,466	2,081	,046 ^b
Residual	2,671	24	,111		
Total	40,000	29			

a. Dependent Variable: laporankeuangan

b. Predictors: (Constant), x1, x2, x3, x4, x5

Sumber: data diolah dengan SPSS 20,0 (2018)

Dari uji t yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa untuk variabel Teknologi Informasi memperoleh nilai signifikansi 0,910 nilai signifikansi tersebut menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau H_2 di tolak. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mansur dkk (2014) yang menghasilkan bahwa Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dari hasil penelitian yang menjelaskan bahwa Teknologi Informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dari uji t yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa untuk variabel Sistem Pengendalian Intern memperoleh nilai signifikansi 0,046 nilai signifikansi tersebut menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau H_3 di terima. Hasil penelitian ini di dukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahaputra (2014) yang menghasilkan Sistem pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dari uji t yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa untuk variabel Nilai Informasi memperoleh nilai signifikansi 0,411 nilai signifikansi tersebut menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa Nilai Informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau H_4 di tolak. Maka disimpulkan Nilai Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Afrianti (2011) menunjukkan bahwa Nilai Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

Dari uji t yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa untuk variabel Pengawasan Keuangan memperoleh nilai signifikansi 0,021 nilai signifikansi tersebut menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Keuangan berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau H_5 di terima. Hal ini berarti bahwa pengawasan keuangan daerah di dinas-dinas kabupaten Pamekasan belum di terapkan secara efektif, sehingga tidak dapat meningkatkan nilai informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan. Hasil penelitian ini di dukung dengan penelitian yang dilakukan Mansur dkk (2017) yang menghasilkan Pengawasan Keuangan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dari uji secara simultan (Uji F) yang dilakukan peneliti di atas maka memperoleh nilai 0,021 dari nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi Sistem Pengendalian Intern, Nilai Informasi, Pengawasan Keuangan, secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan karena nilai $0,021 > 0,05/5\%$ dari kriteria yang signifikan yang ada.

Pengawasan Keuangan sangatlah penting dikarenakan dengan meningkatkan SDM, Teknologi Informasi. Sistem Pengendalian Intern, Nilai Informasi, akan meningkatkan kepatuhan dalam melakukan kualitas Laporan Keuangan. Karena Pengawasan Keuangan tersebut berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dalam hal ini berarti bahwa pengawasan keuangan dan sistem Pengendalian Intern telah dilaksanakan secara efektif, sedangkan sumber daya manusia yang berkualitas di dinas Kabupaten Pamekasan digunakan secara optimal, dan penggunaan Teknologi informasi sudah di manfaatkan secara langsung. Sehingga dapat meningkatkan keandalan dan informasi yang di dapat oleh laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat membantu mengurangi di resiko kesalahan material yang ada di Kabupaten Pamekasan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab di atas dapat disimpulkan bahwa secara persial berdasarkan Uji T dari ke lima variable yaitu Sistem Pengendalian Intern, Pengawasan Keuangan berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan sedangkan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Nilai Informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Kabupaten Pamekasan. Dan secara simultan berdasarkan hasil Uji F memperoleh kesimpulan bahwa Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Nilai Informasi, pengawasan Keuangan berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan kabupaten Pamekasan. Dan berdasarkan hasil uji R square hanya 10,9% tingkat pengaruhnya terhadap Kualitas Informasi terhadap Laporan Keuangan kabupaten Pamekasan sedangkan sisanya 89,3% dijelaskan oleh variable lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini. Kesimpulan berisi rangkuman singkat atas hasil penelitian dan pembahasan. [TNR 11 spasi 1].

DAFTAR PUSTAKA

Arfianti, D., & Kawedar, W. (2011). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Studi pada satuan kerja perangkat daerah dikabupaten Batang) (doctoral dissertation, universitas Diponegoro). Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.

Budiawan. 2014. *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal*. Jakarta. Andi.

Dinas Pamekasan kab, www.go.id.

Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi analisis multivariat dengan program SPSS*.

Hery. 2013. *Konsep Akuntansi dan Auditing*. Yogyakarta. Gava Media.

Ihyaul, Ulum . *Audit Sektor Publik*. Edisi 1. Jakarta. Bumi Aksara.

- Kadir, Abdul. 2003. *Pengenalan sistem informasi*. Edisi 1. Yogyakarta. Andi.
- Khasmir. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Penerbit: Jakarta. Pt RajaGrafindo persada.
- Mahaputra dan Putra. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kualitas Informasi pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah* : E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana hal 230-244.
- Mahaputra, I. P. U. R., & Putra, I. W. (2014). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. E- Jurnal Akuntansi, 230-244.
- Mansur., et.al. 2017. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal of applied Accounting and taxation, Vol. 8, No. 2 : 143-152.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansidan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik* : Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2, No. 1 : 1-17.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Notoatmodjo, S. (2017). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 SPIP
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi pemerintahan.
- Pamekasan kab. go.id. Profil
- Republika Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan. 2017 . *BPK Temukan kasus 455 Dugaan korupsi KPK* www.compas.com
- Rivai, dan sagala., 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Penerbit: Pt RajaGrafindo persada.
- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung ALFABETA, CV.
- Suliyanto. 2009. *Metoderiset bisnis*. Yogyakarta: ANDI

Sunyoto, D. (2010). *Uji KHI kuadrat dan regresi untuk penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Undang-undang 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara

Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Wiyono, G. (2011). *3inone; Merancang penelitian bisnis dengan analisis SPSS 20.0 & Smart PLS 2.0*. Yogyakarta: UPP STIM.

Contoh referensi dari buku :

Monroe, K. B. (2007). *Pricing Making Profitable Decision* (3 ed.). Singapore: McGraw-Hill.

Contoh referensi dari artikel jurnal :

Fadjar, A. M. (2008). Poligami dan Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 4(4), 2-15.

Contoh referensi dari artikel jurnal dengan DOI :

Smith, G. (2012). *Barthes on Jamie: Myth and the TV revolutionary*. *Journal of Media Practice*, 13, 3-17. http://dx.doi.org/10.1386/jmpr.13.1.3_1

Contoh referensi dari prosiding (seminar) :

Santoso, A., dan Sumarno, A. (2006). Studi Penyempurnaan Teknis pada Kapal Ikan Tipe Sekoci 10 GT dengan menggunakan Model Komputer. Seminar Nasional Hasil-hasil Penelitian Perikanan dan Kelautan. Universitas Brawijaya Malang, 20-21 Pebruari 2006

Contoh referensi artikel dari website :

Thompson, A. (1998). *The Adult and the Curriculum*. [Online]. Tersedia pada : <http://www.ed.uiuc.edu/EPS/PESYearbook/1998/Thompson.html> [30 Maret 2000]